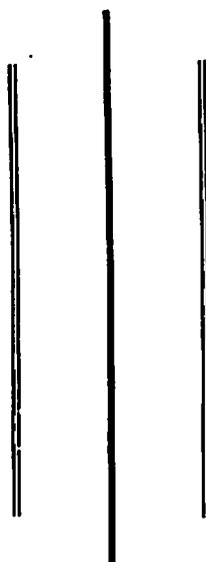




# **NOTA KEUANGAN**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Umum .....	1
	1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perhitungan APBD 2006 .....	4
	1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Perhitungan APBD 2006 .....	5
	1.4. Sistematika Penulisan Nota Perhitungan APBD 2006 .....	9
<b>BAB II</b>	<b>REALISASI PENDAPATAN DAERAH</b>	
	A. Pendapatan Asli Daerah .....	11
	B. Dana Perimbangan .....	37
	C. Lain-lain Penerimaan Yang Sah .....	40
<b>BAB III</b>	<b>REALISASI BELANJA DAERAH</b>	
	A. Belanja Aparatur Daerah .....	43
	B. Belanja Pelayanan Publik .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>REALISASI PEMBIAYAAN</b> .....	47
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.UMUM**

Sebagaimana mekanisme penyampaian Laporan Perhitungan APBD tahun sebelumnya, Laporan Perhitungan APBD Tahun 2006 masih menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dengan demikian mekanisme penyampaian Laporan Perhitungan untuk Tahun Anggaran 2006 sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 merupakan kali terakhir dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sebagaimana bahan Laporan Keuangan, dokumen-dokumen yang disampaikan didalam Laporan Perhitungan ini adalah :

1. Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
2. Neraca Tahun 2006
3. Laporan Arus Kas 2006
4. Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten / Kota harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi APBD
2. Neraca

### 3. Laporan Arus Kas

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dengan memperhatikan substansi Laporan Keuangan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran, perbedaannya hanya terdapat pada adanya Nota Perhitungan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila dicermati, Nota Perhitungan hanya menjelaskan secara kuantitatif tentang Realisasi APBD yang terjadi, namun tidak demikian dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang memberikan secara keseluruhan atas Laporan Keuangan baik untuk Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas, beserta beberapa indikator ekonomi makro yang mempengaruhi suatu kinerja keuangan APBD.

Namun demikian perlu disampaikan bahwa dalam penyusunan Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, sudah mengadopsi sistem Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimana sebelum dilakukan pembahasan oleh DPRD, laporan Keuangan yang telah disusun harus terlebih dahulu diaudit oleh BPK Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, setelah Tahun Anggaran 2006 berakhir, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun Laporan Keuangan APBD Tahun 2006. Pada tanggal 13 Pebruari 2007, Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Dari

laporan Keuangan yang telah disampaikan tersebut, BPK RI melalui surat tugasnya pada tanggal 14 Pebruari 2007 Nomor 31/ST/XIV.12/02/2007 telah melakukan audit Laporan Keuangan dari tanggal 19 Pebruari sampai dengan 30 Maret 2007.

Dari proses audit yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerima dokumen Hasil Pemeriksaan yang merupakan dokumen hasil audit secara menyeluruh atas Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006. Secara keseluruhan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 April 2007 Nomor 56/R/XIV.12/04/2007, didapat bahwa Laporan Keuangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah masuk dalam Kriteria Wajar dengan Pengecualian artinya bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lamongan setelah dilakukan audit dengan melakukan pengujian secara material dan uji formasi didapat telah dilakukan secara wajar namun ada beberapa bagian tertentu yang harus dilakukan penyesuaian - penyesuaian seingga mengakibatkan adanya perubahan materi Laporan Keuangan.

Dengan telah selesainya proses audit tersebut maka Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2006 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

## **1.2.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERITUNGAN APBD 2006**

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Perhitungan APBD ini adalah untuk :

1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2006 ;
2. Merupakan penjabaran singkat terhadap kebijaksanaan arah dan kebijaksanaan pembangunan selama kurun taun 2006 ;
3. Menjelaskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ;
4. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Merupakan kelengkapan dokumen dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

### **1.3.LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD 2006**

Didalam penyusunan Nota Perhitungan APBD Taun Anggaran 2006 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

11. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambaan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penetapan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA PERHITUNGAN APBD**

Penyusunan Nota Perhitungan APBD merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan arah dan kebijaksanaan umum dan realisasi APBD Tahun Anggaran

2006. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

Bab I memuat penjelasan umum mengenai hal-hal penting atau issue-isue strategis dalam penyusunan Laporan keuangan pelaksanaan APBD.

Bab II memuat ringkasan realisasi dan penjelasan Pendapatan Daerah.

Bab III memuat ringkasan dan penjelasan realisasi Belanja Daerah

Bab IV memuat ringkasan dan penjelasan realisasi Pembiayaan Daerah

Bab V memuat uraian penutup

## BAB II

### REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mencapai tingkat perkembangan yang baik di Kabupaten Lamongan. Secara rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan 10 %. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kapasitas fiskal yang diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat pula. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut maka upaya - upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam kerangka peningkatan pendapatan daerah semakin didorong mengingat bahwa kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pendanaan yang semakin meningkat.

Namun demikian melihat perkembangan pemungutan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, telah muncul opini bahwa Pemerintah Daerah dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah telah menyebabkan beban ekonomi masyarakat semakin berat dan menghambat pertumbuhan investasi. Permasalahan tersebut timbul karena Pemerintah Daerah menghadapi tingkat kebutuhan fiskal yang semakin mendesak sedangkan Dana Alokasi Umum masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan daerah, sehingga timbul adanya upaya-upaya untuk mendorong

peningkatan melalui Pendapatan Asli Daerah yang tidak proposional.

Untuk menghindari permasalahan - permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemungutannya telah menempuh beberapa kebijakan antara lain :

1. Dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi untuk memperbaiki manajemennya khususnya laporan penghasilan sehingga petugas semakin mudah untuk dapat menghitung berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.
2. Meningkatkan sistem pelayanan publik khususnya dibidang perijinan dengan mengutamakan transparansi dan menetapkan standard pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat dapat mengetahui kepastian berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus perijinan. Transparansi ini sangat perlu untuk merangsang masyarakat untuk semakin mudah memperoleh akses pelayanan oleh Pemerintah.
3. Memberikan semacam insentif dan diskon di beberapa pelayanan khususnya pengurusan Akte Kelahiran diberikan secara gratis bagi keluarga yang mengurus akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Upaya ini juga ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan melarang kepada Pemerintah Desa untuk menghilangkan portal jalan masuk desa sehingga memudahkan akses para pengguna untuk menyalurkan barang dan jasa sampai ke pelosok desa.
4. Dilakukan pendataan wajib pajak dan retribusi sebagai bahan

dalam mengukur kapasitas potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini sangat diperlukan guna mendukung perencanaan pendapatan dimasa-masa yang akan datang

Selama tahun anggaran 2006, setelah dilakukan konsolidasi entitas laporan keuangan oleh Badan Keuangan dan Barang Daerah pada sisi Pendapatan Daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 640.689.848.070,00,00 pada perkembangannya selama kurun tahun anggaran berjalan telah terealisasi sebesar Rp. 661.759.337.197,70 sehingga terjadi pelampauan dari target sebesar Rp. 21.069.489.127,70 atau tercapai sebesar 103,29 %.

Adapun realisasi pendapatan tahun 2006 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Realisasi Komponen Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2006**

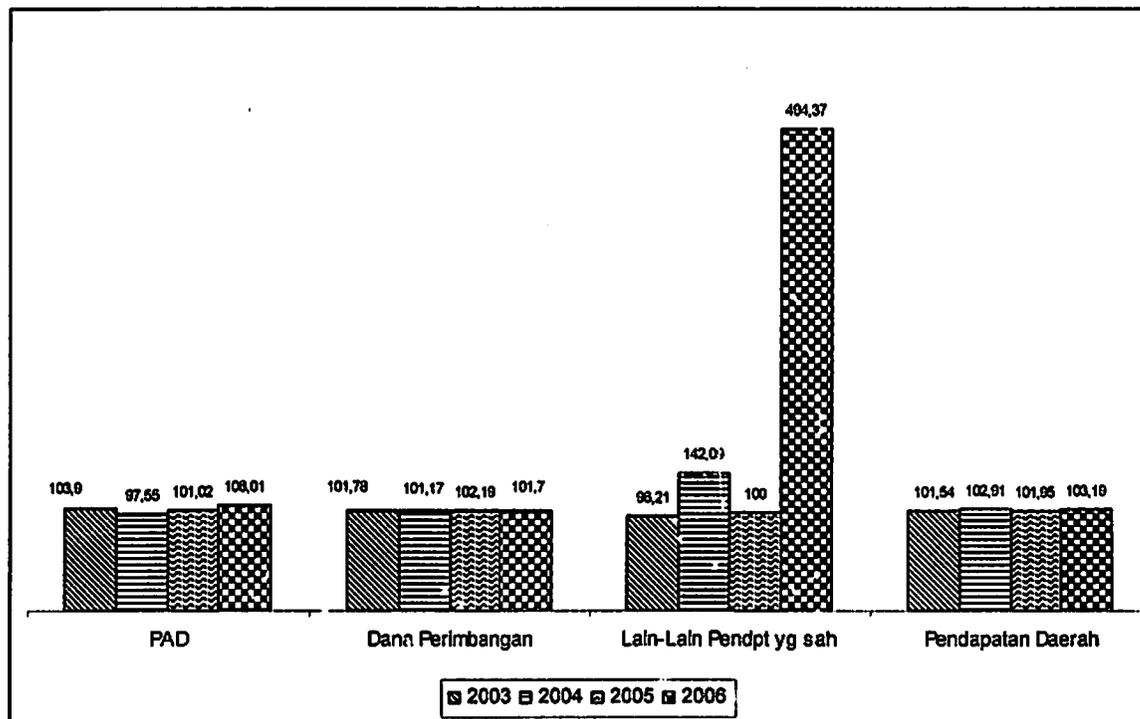
No	Komponen Pendapatan	APBD 2006		%
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	39.294.555.300	43.058.501.192,83	109,58
2	Dana Perimbangan	599.595.292.770	609.802.181.824,87	101,70
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.800.000.000	8.898.654.180,00	494,37
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>640.689.848.070,00</b>	<b>661.759.337.197,70</b>	<b>103,29</b>

Pencapaian realisasi keseluruhan pendapatan daerah apabila dilihat dari masing - masing komponennya juga menunjukkan tingkat realisasi yang cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan yang dipungut dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tingkat realisasinya mencapai 109,58 % lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat

realisasi tahun 2005 yang mencapai 101,02 %. Untuk Dana Perimbangan dimana merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lamongan mencapai tingkat realisasi sebesar 101,70 lebih rendah tingkat realisasinya dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai tingkat 102,19, sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah realisasinya melonjak mencapai tingkat 494,37 % dari target yang ditetapkan.

Untuk melihat perbandingan dan perkembangan kinerja Pendapatan Daerah dibawah ini disajikan tingkat perkembangan pendapatan daerah dari tahun 2003 sampai dengan 2006 sebagaimana Grafis 1 dibawah ini :

**Grafik 1**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2003 s/d 2006**



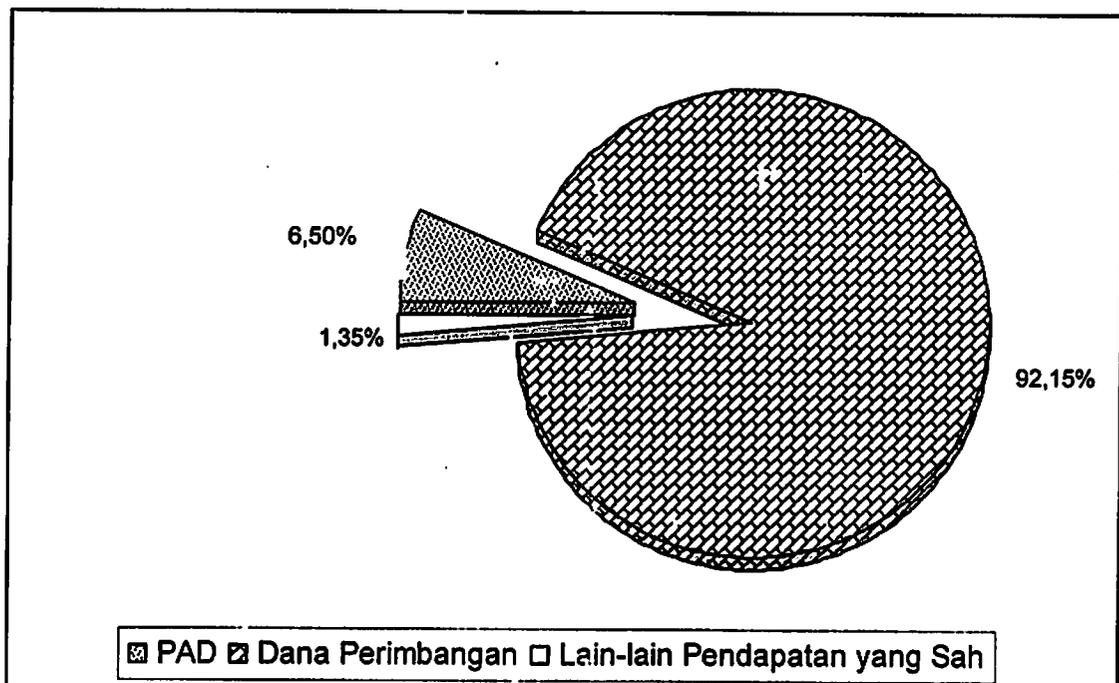
Melihat perkembangan komponen - komponen pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa secara rata - rata tingkat realisasinya diatas 100 % dalam arti bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dibidang pendapatan daerah. Sedangkan apabila melihat lebih dalam komponen - komponen pendapatan daerah, seperti PAD, Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah, perkembangan realisasi menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan komponen PAD seperti ditahun 2004 teralisasi sebesar 97,55 % sedangkan perkembangan tertinggi dicapai pada tahun 2006 yang mencapai 109,58 %. Untuk Dana Perimbangan perkembangan realisasinya selama 4 tahun terakhir alurnya konstan dengan tingkat pencapaian 101 % - 102 %. Perkembangan realisasi dana perimbangan ini dimungkinkan karena penerimaannya selalu disesuaikan dengan ketetapan Pemerintah Pusat. Hal lain terjadi pada Lain - Lain Pendapatan Yang Sah dimana perkembangan realisasinya sangat fluktuatif dan dinamis. Pada tahun 2003 tercapai realisasi 96,21 % sedangkan di tahun 2006 mencapai tingkat realisasi 494,37 %. Fluktuasi ini disebabkan dinamisnya komponen pada Lain - Lain Pendapatan Yang Sah karena menampung sejumlah penerimaan - penerimaan baik dari Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan terlebih dahulu atau belum ditampung didalam target APBD.

Dengan memperhatikan perkembangan tingkat realisasi tersebut diatas, nampak bahwa tingkat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2006 kinerja realisasinya paling tinggi selama kurun 4 tahun terakhir.

Hal ini karena didukung pencapaian realisasi PAD yang tinggi juga adanya lonjakan realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang mencapai 4 kali lipat.

Sedangkan untuk melihat perbandingan kontribusi (share) komponen - komponen Pendapatan Daerah dengan mengacu pada tingkat realisasinya dapat dilihat pada grafis 2 dibawah ini :

**Grafik 2**  
**Perbandingan kontribusi (share)**  
**realisasi komponen Pendapatan Daerah**



Dilihat dari sisi perbandingan komponen - komponen Pendapatan Daerah, kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai sebesar 92,15 %, untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,50 % dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,35 %.

Selanjutnya untuk mengetahui seluruh komponen Pendapatan Daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut :

#### A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dari ketetapan sebesar Rp. 39.294.555.300,00 telah terealisasi sebesar Rp. 43.058.501.192,83 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 3.763.945.892,83 atau tercapai sebesar 109,58 % sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006**

No.	Komponen PAD	APBD 2006		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak Daerah	11.060.095.000	10.909.571.668,90	98,64
2	Retribusi Daerah	16.149.911.800	18.080.077.425,00	111,95
3	Bagian Laba BUMD	6.442.073.500	6.331.073.588,95	98,28
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.642.475.000	7.737.778.509,98	137,13
	Jumlah PAD	39.294.555.300,00	43.058.501.192,83	109,58

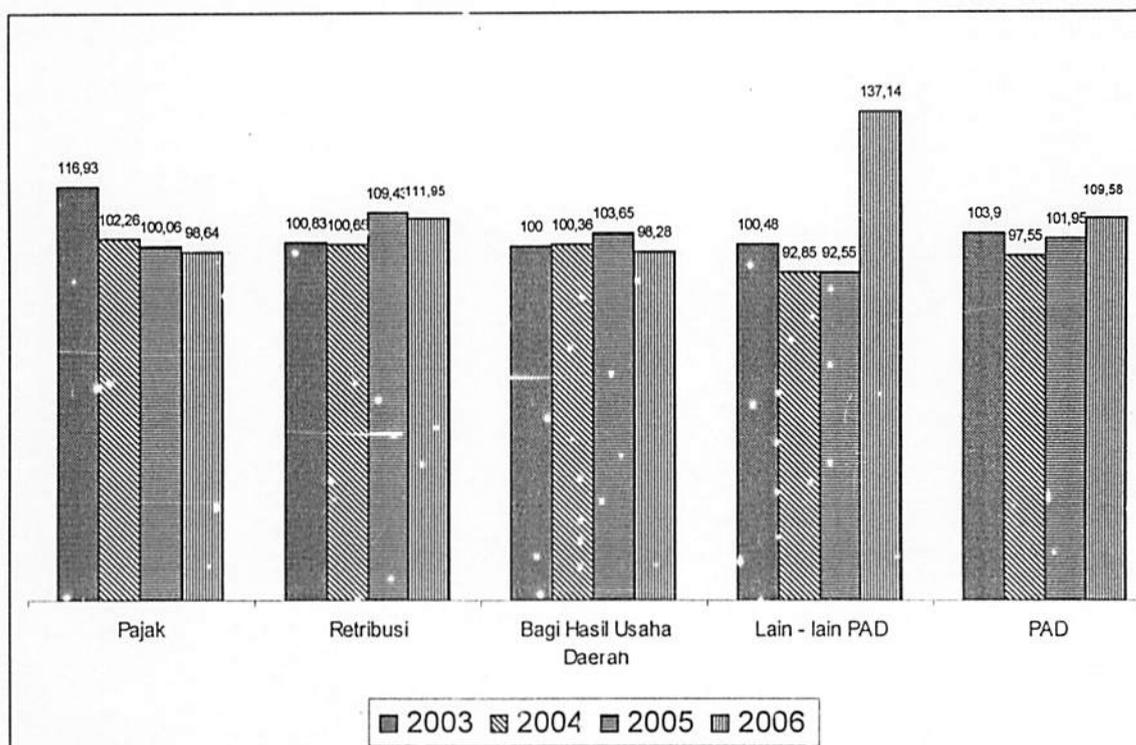
Dari tingkat realisasi sebagaimana didalam Tabel 2 nampak kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target yang ditetapkan yakni dari Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan untuk Pajak Daerah dan Bagian Laba BUMD realisasinya masih dibawah

target yang ditetapkan. Realisasi terbesar terjadi Lain - Lain PAD Yang Sah sedangkan tingkat realisasi paling rendah terjadi pada Bagian Laba BUMD.

Dibandingkan dengan perkembangan selama 4 tahun terakhir, secara keseluruhan PAD pada Tahun 2006 tingkat realisasinya memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya. Nilai tingkat realisasi terendah terjadi pada tahun 2004 dengan tingkat realisasi sebesar 97,55 %.

Untuk komponen - komponen PAD dari perkembangan selama 4 tahun terakhir, kinerja masing - masing dapat dilihat pada Grafik 3 dibawah ini :

**Grafik 3**  
**Perkembangan tingkat realisasi komponen PAD**  
**Tahun 2003 - 2006**



Tingkat realisasi pajak daerah perkembangannya semakin menurun dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Tingkat tertinggi dicapai pada tahun 2003 yakni sebesar 116,93 % hingga tahun 2006 menurun hingga 98,64 %. Penurunan kinerja dari pajak daerah ini berhubungan dengan tingkat realisasi pajak penerangan jalan yang juga mengalami penurunan, karena jenis penerimaan ini merupakan kontributor terbesar.

Perkembangan realisasi retribusi daerah mengalami perkembangan yang beragam. Nilai realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2005 yang mencapai 109,43 % berbeda tipis dengan pencapaian tahun 2006 yang mencapai 111,95 %. Namun demikian secara keseluruhan kinerja penerimaan ini selama 4 tahun terakhir masih diatas 100 %.

Tingkat realisasi untuk Bagi Hasil Usaha Daerah perkembangan realisasinya cukup beragam. Selama 4 tahun terakhir pada Tahun 2006 ini tingkat realisasinya mencapai 98,28 %. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai tingkat realisasi sebesar 103,65 %.

Dilihat dari perkembangannya Lain: Lain PAD Yang Sah mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Untuk pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2006 ini yakni mencapai sebesar 137,13 %. Sedangkan terendah mencapai 92,55 %.

Dari realisasi komponen - komponen PAD dibawah ini dapat dirinci realisasi perkomponen PAD sebagai berikut :

### 1. Pajak Daerah

Dari bagian Pajak Daerah dari ketetapan sebesar Rp. 11.060.095.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 10.909.571.668,90 sehingga mengalami kurang dari target sebesar Rp. 150.523.331,10 atau tercapai sebesar 98,64 %.

Dari masing-masing realisasi Pajak Daerah dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dari ketetapan sebesar Rp. 13.500.000,00 telah terealisasi Rp. 13.996.700,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 496.700,00 atau tercapai sebesar 103,68 %.

Pencapaian realisasi tersebut diperoleh melalui peningkatan dan sosialisasi kepada wajib pajak disertai pendekatan yang persuasif. Namun demikian dimasa mendatang perlu adanya sosialisasi kepada para Pengusaha Hotel untuk lebih meningkatkan kualitas administrasinya, sehingga petugas dalam mendata potensi Pajak Hotel dapat menghitung secara riil.

- b. Pajak Restoran dari Ketetapan sebesar Rp.46.250.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 49.300.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 3.040.000,00 atau tercapai sebesar 106,57 %.

Tercapainya realisasi Pajak Restoran disebabkan adanya pertumbuhan sektor perdagangan informal yang semakin meningkat. Untuk mendukung pertumbuhan positif tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan kebijakan yang persuasif terhadap pertumbuhan sektor informal, disamping memberi kemudahan untuk meningkatkan lapangan kerja, juga masih memperhatikan keindahan kota Lamongan agar tertata semakin baik.

- c. Pajak Hiburan dari ketetapan sebesar Rp. 95.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 98.160.025,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 3.160.025,00 atau tercapai sebesar 103,33 %.

Tercapainya realisasi tersebut karena adanya peningkatan event hiburan dan jumlah subyek pajak Hiburan .

- d. Pajak Reklame dari ketetapan sebesar Rp.229.401.250,00 telah terealisasi Rp. 242.944.917,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 13.543.667,00 atau tercapai sebesar 105,90 %.

Pencapaian realisasi ini disamping menunjukkan kondisi dunia usaha yang semakin membaik juga merupakan hasil dari upaya intensifikasi melalui penjaringan obyek dan subyek dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

- e. Pajak Penerangan Jalan dari ketetapan sebesar

Rp. 10.442.825.000,00 telah terealisasi Rp. 10.266.174.826,90 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 176.650.173,10 atau tercapai sebesar 98,31 %.

Tidak tercapainya target Pajak Penerangan Jalan ini karena ekspansi perkembangan pelanggan yang tidak sesuai dengan target sehingga penentuan target over estimate. Hal ini berkaitan dengan kurangnya penyediaan daya oleh PLN akibat dari krisis energi yang menerpa Indonesia akibat dari kenaikan BBM, sehingga berpengaruh terhadap ekspansi jumlah pelanggan di Kabupaten Lamongan.

- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dari ketetapan sebesar Rp. 163.708.250,00 telah terealisasi Rp. 169.208.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.499.750,00 atau tercapai sebesar 103,36 %.

Berlebihnya penerimaan Pajak ini merupakan hasil intensifikasi yang dilakukan aparat pemungut yang didukung pula oleh kesadaran para wajib pajak.

- g. Pajak Pengambilan Sarang Burung dari ketetapan sebesar Rp. 51.900.000,00 telah terealisasi Rp. 52.281.700,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 381.700,00 atau tercapai sebesar 100,74 %.

Dengan makin lebih diintensifkan penyuluhan mendorong kesadaran kepada para obyek pajak Pengambilan Sarang

Burung memiliki kesadaran terhadap kewajibannya. Tercapainya realisasi ini juga dilakukan seiring dengan dilakukan peningkatan operasional pemungutan pada wajib pajak.

- h. Pajak Parkir dari ketetapan sebesar Rp. 17.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 17.505.000,00, sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.000,00 atau tercapai 100,03 %.

Pencapaian realisasi ini akan semakin ditingkatkan mengingat masih rendahnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya, sehingga diharapkan dimasa mendatang dapat ditingkatkan kontribusinya.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp. 16.149.911.800,00 telah terealisasi Rp. 18.080.077.425,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.930.165.625,00 atau tercapai sebesar 111,48 %.

Dari masing-masing realisasi Retribusi Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dari ketetapan sebesar Rp. 6.846.106.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.632.284.370,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 786.178.370,00 atau tercapai sebesar 111,85 %.

Dari pencapaian tersebut, Retribusi Pelayanan Kesehatan dihasilkan dari RSD Dr. Soegiri dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 5.619.747.150,00 sedangkan Dinas Kesehatan realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.012.537.220,00.

Pencapaian realisasi tersebut sebagai meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah sejumlah peralatan dan laboratorium baik di rumah sakit DR. Soegiri maupun di Puskesmas-Puskesmas, sehingga secara kuantitas dapat meningkatkan jumlah layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dari ketetapan sebesar Rp. 100.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 101.356.900,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.356.900,00 atau tercapai sebesar 101,36 %.

Berlebihnya pencapaian realisasi ini disebabkan adanya kesadaran pada wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan meningkatkan manajemen pemungutan.

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dari ketetapan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.100.184.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 40.184.000,00 atau tercapai sebesar 103,79 %.

Tercapainya realisasi ini seiring dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam memiliki surat - surat kependudukan serta meningkatnya kualitas pelayanan dengan menyelenggarakan pelayanan KTP di tingkat Kecamatan.

- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil dari ketetapan sebesar Rp. 190.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 274.148.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 84.148.500,00 atau tercapai sebesar 144,29 %.

Tercapainya realisasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran bayi dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Dalam Tahun 2006 ini juga telah dikeluarkan kebijakan pengurusan secara gratis bagi bayi yang baru lahir dan langsung diajukan akte kelahirannya.

- f. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari ketetapan sebesar Rp. 2.699.100.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.229.545.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 530.445.000,00 atau tercapai sebesar 119,65 %.

Tercapainya realisasi penerimaan ini berasal dari Retribusi Parkir berlangganan yang ditargetkan sebesar Rp. 2.550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.080.112.000,00 atau lebih dari target sebesar 530.112.000,00 atau sebesar 120,79 %. Sedangkan untuk Parkir Harian terealisasi sebesar 100,81 dan Parkir

dikawasan pasar terealisasi sebesar 100,05 %.

- g. Retribusi Pelayanan Pasar dari ketetapan sebesar Rp. 1.814.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.816.367.750,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 2.367.750,00 atau tercapai sebesar 100,13 %.

Tercapainya realisasi ini ditempuh melalui perbaikan manajemen pemungutan dengan didasarkan pada pendataan subyek retribusi Pelayanan Pasar. Pendataan dilakukan guna mengetahui secara pasti potensi retribusi dengan jumlah pedagang yang merupakan subyek retribusi baik pedagang yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Meskipun pendataan ini belum mencakup keseluruhan Pasar di Kabupaten Lamongan, hal ini akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari ketetapan sebesar Rp. 390.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 390.450.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 450.000,00 atau tercapai sebesar 100,12 %.

Pencapaian realisasi tersebut didukung dengan adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat yang dilaksanakan secara gabungan serta meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang semakin mantap.

- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dari

ketetapan sebesar Rp. 14.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 14.010.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 10.000,00 atau tercapai sebesar 100,07 %.

Pencapaian realisasi penerimaan ini diupayakan intensifikasi pemungutan khususnya ditujukan kepada Kantor - Kantor Pemerintahan dan perusahaan - perusahaan di Kabupaten Lamongan.

- j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari ketetapan sebesar Rp. 789.113.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 815.271.604,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 26.158.604,00 atau tercapai sebesar 103,31 %.

Tercapainya realisasi dari komponen ini, disebabkan tercapainya realisasi dari beberapa penerimaan dari sewa tanah dan bangunan serta tanah - tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipergunakan untuk papan reklame.

- k. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan dari ketetapan sebesar Rp. 360.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 360.750.000,00 sehingga lebih dari target sebesar Rp. 250.000,00 atau tercapai sebesar 100,07 %.

Tercapainya realisasi penerimaan retribusi ini dilakukan dengan intensifikasi pemungutan dilapangan. Perbaikan kondisi tempat pelelangan dan naiknya tingkat kesadaran

masyarakat menyebabkan upaya - upaya intensifikasi berjalan dengan baik.

- l. Retribusi Terminal dari ketetapan sebesar Rp. 118.728.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 118.732.100,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 4.100,00 atau tercapai sebesar 100,00 %.

Tercapainya target penerimaan retribusi terminal ini disebabkan adanya operasional bus yang cukup stabil serta adanya upaya penjaringan yang intensif pada wajib retribusi.

- m. Retribusi Tempat Khusus Parkir dari ketetapan sebesar Rp. 103.564.800,00 telah terealisasi sebesar Rp. 103.759.750,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 194.950,00 atau tercapai sebesar 100,19 %.

Tercapainya realisasi ini karena adanya intensifikasi penarikan dari petugas lapangan dan pengawasan yang semakin intensif di beberapa objek retribusi.

- n. Retribusi Rumah Potong Hewan dari ketetapan sebesar Rp. 45.300.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 45.400.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 100.000,00 atau tercapai sebesar 100,22 %.

Tercapainya realisasi penerimaan ini disebabkan adanya pengawasan yang intensif terhadap pemotongan hewan

baik yang dilakukan didalam RPH maupun diluar RPH.

- o. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dari ketetapan sebesar Rp. 372.000.000,00 telah terealisasi Rp. 372.105.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 105.000,00 atau tercapai sebesar 101,03 %.

Tercapainya realisasinya ini semakin mantapnya sektor pariwisata di Kabupaten Lamongan terhadap kontribusinya dalam meningkatnya PAD. Diluar Wisata Bahari Lamongan, obyek wisata lainnya di Kabupaten Lamongan memiliki daya tarik sebagai alternatif tujuan wisata yang perlu dikembangkan.

- p. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari ketetapan sebesar Rp. 490.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 495.426.100,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.426.100,00 atau tercapai sebesar 101,11 %.

Adanya perkembangan sektor perumahan dan dunia usaha dan industri yang signifikan, menyebabkan Retribusi ini mengalami tingkat realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Perkembangan penerimaan ini diharapkan dapat semakin meningkat mengingat perkembangan khususnya sektor perumahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

- q. Retribusi Izin Gangguan dari ketetapan sebesar

Rp. 90.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 129.366.800,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 39.366.800,00 atau tercapai sebesar 143,74 %.

Berlebihnya penerimaan ini merupakan hasil upaya intensifikasi melalui penjaringan dan penyuluhan kepada wajib retribusi.

- r. Retribusi Izin Trayek dari ketetapan sebesar Rp. 17.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 17.006.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 6000,00 atau tercapai sebesar 100,04 %.

Berlebihnya realisasi penerimaan ini karena didukung adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat kendaraan yang dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait.

- s. Retribusi Ijin Usaha Jasa dari ketetapan sebesar Rp. 125.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 279.706.250,00 sehingga terjadi pelampauan target sebesar Rp. 154.206.250,00 atau tercapai sebesar 222,87 %.

Pencapaian realisasi ini dilakukan dengan melalui peningkatan pelayanan dengan Pelayanan Satu Atap.

- t. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dari ketetapan sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Pencapaian realisasi ini diupayakan dari semakin intensifnya petugas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan. Hal ini juga berkaitan dengan merebaknya penyakit yang terjadi pada hewan sehingga perlu adanya pemantauan yang lebih dari petugas sehingga dapat meminimalisir pandemi penyakit yang berasal dari hewan di Kabupaten Lamongan.

u. Retribusi Izin Penebangan kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat, dari ketetapan sebesar Rp. 45.500.000,00 teralisasi sebesar Rp. 79.612.301,00 melampaui dari target sebesar Rp. 34.112.301,00 atau tercapai sebesar 174,97 %. Pencapaian ini karena adanya kesadaran wajib retribusi dan intensifikasi para pemungut.

v. Retribusi Pas kecil dan Sertifikasi Penyempurnaan Kapal, dari ketetapan sebesar Rp. 5.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 5.695.000,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 195.000,00 atau tercapai sebesar 103,55 %.

Pencapaian realisasi ini diperoleh melalui intensifikasi kepada subyek retribusi ini. Namun demikian untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi ini perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi mengingat cakupan yang masih kecil.

Retribusi Ijin Penggilingan Padi, dari ketetapan sebesar Rp. 15.000.000,00 telah terealisasi sebesar

Rp. 20.850.000,00 sehingga mengalami pelampauan Rp. 5.850.000,00 atau tercapai sebesar 139%

- w. Retribusi Penggantian biaya penggandaan dokumen lelang, dari ketetapan sebesar Rp. 400.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 618.850.000,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 218.850.000,00 atau tercapai sebesar 154,71 %.

Tercapainya realisasi ini disebabkan semakin banyaknya kegiatan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan secara kontraktual.

- x. Retribusi ijin eksplorasi, eksploitasi dan pengambilan ABT dari ketetapan sebesar Rp. 2.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 200.000,00 atau tercapai sebesar 108,00 %.

Tercapainya realisasi ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan ABT khususnya pada area perumahan dan perusahaan.

- y. Retribusi Reklamasi, dari ketetapan sebesar Rp. 3.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,00 atau tercapai sebesar 100,00 %.

Tercapainya realisasi ini disebabkan karena adanya kegiatan Proyek Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kecamatan

Paciran yang masih dalam proses pembangunan.

- z. Retribusi ijin usaha perikanan, dari ketetapan sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 %.

Tercapainya realisasi ini disebabkan oleh upaya sosialisasi yang diadakan telah diakomodir oleh masyarakat nelayan dan dalam upaya ini Pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan masyarakat.

- ab. Retribusi Izin Usaha Bidang Pariwisata dari ketetapan sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Tercapainya realisasi ini diupayakan dari kegiatan - kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Lamongan yang semakin berkembang.

### **3. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah**

Untuk komponen ini dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.442.073.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 6.331.073.588,95 sehingga tercapai 98,28 %.

Ada 5 komponen dari jenis penerimaan ini yakni :

- a. Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar dari ketetapan sebesar Rp. 370.900.000,00 telah terealisasi sebesar

Rp. 370.900.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dari ketetapan sebesar Rp. 155.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 155.000.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Bank Jatim dari ketetapan sebesar Rp. 866.173.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 866.173.588,95 atau tercapai Rp. 88,95 atau tercapai 100 %. Pencapaian realisasi ini didasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2005.
- d. PT. Wisata Bahari Lamongan dari ketetapan sebesar Rp. 4.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.750.000.000,00 sehingga sesuai dengan target.
- e. Pabrik Es PT. Tirta Maharani dari ketetapan sebesar Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.189.000.000,00 sehingga kurang dari target sebesar 111.000.000,00 atau tercapai sebesar 63,00 %.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Penerimaan dari komponen ini dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.642.475.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.737.778.509,98 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 2.095.303.509,98 atau tercapai sebesar 137,13 %.

Dari masing-masing komponennya dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dari ketetapan sebesar Rp. 17.250.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 17.480.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 230.000,00 atau tercapai sebesar 101,50 %.

Tercapainya realisasi ini diupayakan dari penjualan barang afkiran dan penjualan hasil penebangan pohon.

- b. Jasa Giro dari ketetapan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.616.978.934,39 sehingga lebih dari target sebesar Rp. 416.978.934,39 atau tercapai sebesar 134,75 %.

Tercapainya realisasi ini disebabkan kapasitas keuangan yang dikelola mengalami kenaikan.

- c. Penerimaan Bunga Deposito dari ketetapan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.649.775.678,04 sehingga lebih dari target sebesar Rp. 1.499.775.678,04 atau tercapai sebesar 147,61 %.

Bunga deposito meskipun mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dengan meningkatnya fiskal daerah, maka dalam pengelolaannya mampu terealisasi lebih dari target yang ditetapkan.

- d. Penerimaan Usaha Dinas dari ketetapan sebesar

Rp. 813.300.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 826.850.000,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 13.550.000,00 atau tercapai sebesar 101,67 %. Berlebinnya realisasi penerimaan usaha dinas ini berasal dari penerimaan hasil usaha AKPER yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

- e. Penerimaan Lain-Lain dari ketetapan sebesar Rp. 461.925.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 626.993.897,55 sehingga lebih dari target sebesar Rp. 165.068.987,55 atau tercapai sebesar 135,73 %.

Tercapainya realisasi ini merupakan kontribusi atas penerimaan dana revolving melalui skeme dana APBD Kabupaten Lamongan baik untuk bidang pertanian, peternakan, usaha kecil dan menengah dan pasar desa.

## **B. DANA PERIMBANGAN**

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2006 dari Penerimaan Dana Perimbangan secara keseluruhan dari target sebesar Rp. 599.595.292.770,00 telah terealisasi sebesar Rp. 609.802.181.824,87 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 10.206.889.054,87 atau tercapai sebesar 101,70 % sebagaimana tertera pada Tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2006**

No.	Komponen Dana Perimbangan	APBD 2006		%
		Target	Realisasi	
1	Bagi Hasil Pajak	35.111.467.700,00	41.840.902.676,00	119,17
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	3.340.288.870,00	2.269.501.759,87	67,94
3	Dana Alokasi Umum	493.991.000.000,00	493.991.000.000,00	100,00
4	Dan Alokasi Khusus	39.800.000.000,00	39.800.000.000,00	100,00
5	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27.352.536.200,00	31.900.777.389,00	116,63
	<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>599.595.292.770,00</b>	<b>609.802.181.824,87</b>	<b>101,70</b>

Sesuai dengan ketetapannya, berikut ini tingkat realisasi komponen-komponen Dana Perimbangan :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari ketetapan sebesar Rp. 28.585.024.000 telah terealisasi sebesar Rp. 36.908.328.448,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 8.323.304.448,00 atau sebesar 129,12 %.
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari ketetapan sebesar Rp. 3.368.982.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.196.150.710,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 1.172.831.290,00 atau sebesar 65,19 %.
- c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21) dari ketetapan sebesar Rp. 3.157.461.700,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.736.423.518,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 421.038.182,00 atau sebesar 86,67 %.
- d. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari ketetapan sebesar

Rp. 166.388.640,00 telah terealisasi sebesar Rp. 219.139.450,87 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 52.750.810,87 atau tercapai sebesar 131,70 %.

- e. Iuran Eksplorasi (pertambangan Umum) dari ketetapan sebesar Rp. 2.907.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 6.326.897,00 sehingga lebih dari target sebesar Rp. 3.419.397,00 atau tercapai sebesar 217,61 %.
- f. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan dari ketetapan sebesar Rp. 752.992.730,00 telah terealisasi sebesar Rp. 231.574.370,00 sehingga terdapat kurang dari target sebesar Rp. 521.418.360,00 atau tercapai sebesar 30,75 %.
- g. Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi dari ketetapan sebesar Rp. 2.418.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.812.461.042,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 605.538.958,00 atau tercapai 74,96 %.
- h. Dana Alokasi Umum dari ketetapan sebesar Rp. 493.991.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 493.991.000.000,00.
- i. Dana Alokasi Khusus dari ketetapan sebesar Rp. 39.800.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 39.800.000.000,00.
- j. Dana Perimbangan dari Propinsi dari ketetapan sebesar

Rp. 27.352.536.200,00 telah terealisasi sebesar Rp. 31.900.777.389,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 4.548.241.189,00 atau tercapai sebesar 116,63 %. Dari realisas tersebut dapat dirinci komponennya sebagai berikut :

- 1). Pajak Kendaraan Bermotor dari ketetapan sebesar Rp. 6.650.890.065 telah terealisasi sebesar Rp. 8.548.385.801,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 1.897.495.736,00 atau tercapai sebesar 128,53 %.
- 2). Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dari ketetapan sebesar Rp. 7.915.897.685,00 telah terealisasi sebesar Rp. 8.351.148.414,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 435.250.729,00 atau tercapai sebesar 105,50 %.
- 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari ketetapan sebesar Rp.12.208.733.898,00 telah terealisasi sebesar Rp. 14.257.596.333,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 2.048.862.435,00 atau tercapai sebesar 116,78 %.
- 4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari ketetapan sebesar Rp. 541.014.552,00 telah terealisasi sebesar Rp. 644.815.280,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 103.800.728,00 atau tercapai sebesar 119,19 %.

- 5). Sumbangan Pihak Ketiga dari ketetapan sebesar Rp. 36.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 98.831.561,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 62.831.561,00 atau tercapai sebesar 274,53 %.

### **C. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp. 8.898.654.180,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 7.098.654.180,00 atau tercapai sebesar 494,37 %.

Adapun realisasi tersebut berasal dari :

- a. Penerimaan Restitusi PPH Pasal 21 dari target sebesar Rp. 1.800.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.898.654.180,00 sehingga terdapat lebih dari target sebesar Rp. 98.654.180,00 atau tercapai sebesar 105,48 %.
- b. Bantuan dana kontijensi/Penyeimbang Pemerintah yang tidak dialokasikan mendapatkan alokasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

### BAB III REALISASI BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah secara keseluruhan didalam Tahun Anggaran 2006 dialokasikan sebesar Rp. 667.901.171.150,00 pada pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp. 623.534.414.104,90 sehingga terdapat sisa dana Rp. 44.366.757.045,10 atau tercapai sebesar 93,36 % sebagaimana yang tertera pada Tabel 4 dibawah ini :

**Tabel 4  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2006**

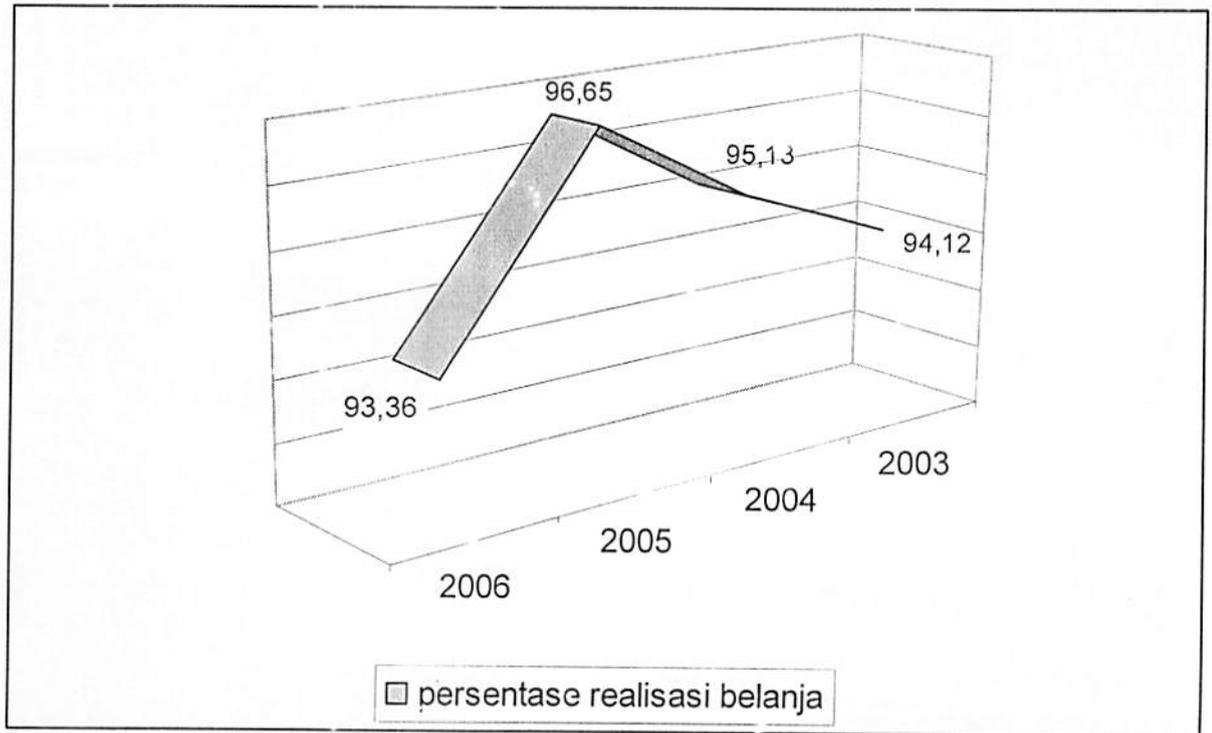
No	Uraian Belanja Daerah	Alokasi	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>APARATUR DAERAH</b>	<u>139.302.196.500,00</u>	<u>125.871.277.188,90</u>	<u>90,36%</u>
1	Belanja Administrasi Umum	113.208.127.500,00	100.905.252.992,90	89,13%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	16.715.092.000,00	15.915.096.725,00	95,21%
3	Belanja Modal	9.378.977.000,00	9.050.927.471,00	96,50%
<b>B</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<u>528.598.974.650,00</u>	<u>497.663.136.916,00</u>	<u>94,15%</u>
1	Belanja Administrasi Umum	252.333.025.500,00	226.907.858.907,00	89,92%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	72.655.300.150,00	72.130.093.322,00	99,28%
3	Belanja Modal	91.190.698.500,00	88.503.125.622,00	97,05%
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	110.169.950.500,00	108.657.104.479,00	98,63%
5	Belanja Tidak Tersangka	2.250.000.000,00	1.464.954.586,00	65,11%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>667.901.171.150,00</b>	<b>623.534.414.104,90</b>	<b>93,36%</b>

Dari realisasi secara keseluruhan tersebut untuk masing-masing realisasi komponen Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Apabila dibandingkan dengan realisasi selama kurun 4 tahun terakhir, Realisasi Belanja Tahun 2006 memiliki efesiensi

tertinggi yakni 93,36 %. Untuk melihat perkembangan realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

**Grafik 4**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun 2003 - 2006**



Dari tabel diatas, grafik menurun menunjukkan efesienalnya semakin tinggi berbanding terbalik dengan tingkat realisasinya. Oleh karena itu dengan melihat grafik diatas, perkembangan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 96,65 % yang berarti juga efesienansi terendah. Efesienansi tertinggi terjadi pada Tahun 2006 dengan tingkat realisasi sebesar 93,36 %.

Untuk melihat tingkat realisasi dari Belanja Daerah dapat dikemukakan secara rinci komponennya sebagai berikut :

### a. Belanja Aparatur Daerah

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 139.302.196.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 125.871.277.188,90 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 13.430.919.311,10 atau tercapai 90,36 % sebagaimana tertera pada tabel 5 dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Realisasi Belanja Aparatur Daerah**

No	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
A	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>113.208.127.500,00</u>	<u>100.905.252.992,90</u>	<u>89,13%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	93.593.141.000,00	81.928.118.847,90	87,54%
2	Belanja Barang dan Jasa	11.586.572.500,00	11.193.776.737,00	96,61%
3	Belanja Perjalanan Dinas	2.347.765.000,00	2.152.865.000,00	91,70%
4	Belanja Pemeliharaan	5.680.649.000,00	5.630.492.408,00	99,12%
B	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	<u>16.715.092.000,00</u>	<u>15.915.096.725,00</u>	<u>95,21%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	2.978.666.200,00	2.918.322.950,00	97,97%
2	Belanja Barang dan Jasa	8.615.072.475,00	8.037.991.975,00	93,30%
3	Belanja Perjalanan Dinas	3.832.304.025,00	3.689.826.500,00	96,28%
4	Belanja Pemeliharaan	1.289.049.300,00	1.268.955.300,00	98,44%
C	<u>Belanja Modal</u>	<u>9.378.977.000,00</u>	<u>9.050.927.471,00</u>	<u>96,50%</u>
	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>139.302.196.500,00</b>	<b>125.871.277.188,90</b>	<b>90,36%</b>

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 113.208.127.500,00 terealisasi sebesar Rp. 100.905.252.992,90 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 12.302.874.507,10 atau tercapai realisasi sebesar 89,13 %. Sisa lebih belanja ini sebagian besar berasal dari

Belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran gaji pegawai selama kurun Tahun 2006.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 16.715.092.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.915.096.725,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 799.995.275,00 atau tercapai realisasi sebesar 95,21 %. Sisa lebih belanja ini merupakan sisa anggaran kegiatan aparatur yang tidak dipergunakan dengan menyesuaikan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 9.378.977.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.050.927.471,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 328.049.529,00 atau tercapai realisasi sebesar 96,50 %. Sisa lebih belanja ini merupakan penyesuaian dari kebutuhan belanja yang disesuaikan dengan harga yang berlaku atau harga pasar dari ketetapan yang dianggarkan, serta menyesuaikan dengan besarnya kontrak pekerjaan.

#### **b. Belanja Pelayanan Publik**

Dari kelompok Belanja Pelayanan Publik yang dialokasikan sebesar Rp. 528.598.974.650,00 telah terealisasi sebesar Rp. 497.663.136.916,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 30.935.837.734,00 atau tercapai sebesar 94,15 % sebagaimana yang tertera dalam Tabel 6 dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Realisasi Belanja Pelayanan Publik**

No	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
A	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>252.333.025.500,00</u>	<u>226.907.858.907,00</u>	<u>89,92%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	233.156.814.500,00	208.216.785.075,00	89,30%
2	Belanja Barang dan Jasa	16.018.422.700,00	15.679.195.145,00	97,88%
3	Belanja Perjalanan Dinas	550.600.000,00	413.455.500,00	75,09%
4	Belanja Pemeliharaan	2.607.188.300,00	2.598.423.187,00	99,66%
B	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	<u>72.655.300.150,00</u>	<u>72.130.093.322,00</u>	<u>99,28%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	3.273.948.400,00	3.801.662.914,00	114,77%
2	Belanja Barang dan Jasa	30.704.888.850,00	30.496.909.393,00	99,33%
3	Belanja Perjalanan Dinas	1.168.219.900,00	1.122.850.150,00	95,64%
4	Belanja Pemeliharaan	37.508.243.000,00	36.708.670.865,00	97,97%
C	<u>Belanja Modal</u>	<u>91.190.698.500,00</u>	<u>88.503.125.622,00</u>	<u>97,05%</u>
D	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	<u>110.169.950.500,00</u>	<u>108.657.104.479,00</u>	<u>98,63%</u>
E	<u>Belanja Tidak Tersangka</u>	<u>2.250.000.000,00</u>	<u>1.464.954.586,00</u>	<u>65,11%</u>
	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>528.598.974.650,00</b>	<b>497.663.136.916,00</b>	<b>94,15%</b>

Dari Kelompok Belanja Pelayanan Publik diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan Rp. 252.333.025.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 226.907.858.907,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 25.425.166.593,00 atau tercapai realisasi sebesar 89,92 %.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 72.655.300.150,00 telah terealisasi sebesar Rp. 72.130.093.322,00 sehingga

**Tabel 6**  
**Realisasi Belanja Pelayanan Publik**

No	Uralan	Alokasi	Realisasi	%
A	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>252.333.025.500,00</u>	<u>226.907.858.907,00</u>	<u>89,92%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	233.156.814.500,00	208.216.785.075,00	89,30%
2	Belanja Barang dan Jasa	16.018.422.700,00	15.679.195.145,00	97,88%
3	Belanja Perjalanan Dinas	550.600.000,00	413.455.500,00	75,09%
4	Belanja Pemeliharaan	2.607.188.300,00	2.598.423.187,00	99,66%
B	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	<u>72.655.300.150,00</u>	<u>72.130.093.322,00</u>	<u>99,28%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	3.273.948.400,00	3.801.662.914,00	114,77%
2	Belanja Barang dan Jasa	30.704.888.850,00	30.496.909.393,00	99,33%
3	Belanja Perjalanan Dinas	1.168.219.900,00	1.122.850.150,00	95,64%
4	Belanja Pemeliharaan	37.508.243.000,00	36.708.670.865,00	97,97%
C	<u>Belanja Modal</u>	<u>91.190.698.500,00</u>	<u>88.503.125.622,00</u>	<u>97,05%</u>
D	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	<u>110.169.950.500,00</u>	<u>108.657.104.479,00</u>	<u>98,63%</u>
E	<u>Belanja Tidak Tersangka</u>	<u>2.250.000.000,00</u>	<u>1.464.954.586,00</u>	<u>65,11%</u>
	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>528.598.974.650,00</b>	<b>497.663.136.916,00</b>	<b>94,15%</b>

Dari Kelompok Belanja Pelayanan Publik diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan Rp. 252.333.025.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 226.907.858.907,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 25.425.166.593,00 atau tercapai realisasi sebesar 89,92 %.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 72.655.300.150,00 telah terealisasi sebesar Rp. 72.130.093.322,00 sehingga

terdapat sisa dana sebesar Rp. 489.180.514,00 atau tercapai realisasi sebesar 99,28 %.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 91.190.698.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 88.503.125.622,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.687.572.878,00 atau tercapai realisasi sebesar 97,05 %.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 110.169.950.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 108.657.104.479,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.512.846.021,00 atau tercapai realisasi 98,63 %.

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 tidak terealisasi secara keseluruhan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.464.954.586,00 atau tercapai realisasi sebesar 65,11 %.

Realisasi Belanja tidak Tersangka dipergunakan untuk :

1. Bantuan bencana alam yang terjadi di Desa Plangwot Kecamatan Laren sebesar Rp. 973.000.000,00
2. Pembangunan Relokasi Pasar Sidoharjo yang terbakar sebesar Rp. 491.954.586,00

## BAB IV

### REALISASI PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan merupakan kelompok anggaran yang merupakan sarana kebijakan pemerintah dalam menyikapi fiskal yang terjadi. Dalam perjalanan anggaran maka realisasi dari pembiayaan dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2006**

No	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.654.577.232,63	24.673.098.232,68	100,08%
2	Penerimaan Dana Revolving	11.861.977.050,00	11.194.880.715,00	94,38%
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>36.516.554.282,63</b>	<b>35.867.978.947,68</b>	<b>98,22%</b>
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
1	Penyertaan Modal	8.273.740.000,00	7.420.739.835,37	89,69%
2	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	41.583.200,00	41.583.200,00	100,00%
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	989.908.002,63	66.630.579.005,11	6730,99%
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>9.305.231.202,63</b>	<b>74.092.902.040,48</b>	<b>796,25%</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>27.211.323.080,00</b>	<b>(38.224.923.092,80)</b>	<b>-140,47%</b>

Dari masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan yang dialokasikan Rp. 36.516.554.282,63 terealisasi sebesar Rp. 35.867.978.947,68. Pencapaian realisasi ini berasal dari realisasi dari Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dari alokasi sebesar Rp. 24.654.577.232,63 telah terealisasi sebesar Rp. 24.673.098.232,68 atau lebih sebesar

Rp. 18.521.000,65. Sedangkan untuk Penerimaan Dana Revolving dari alokasi sebesar 11.861.977.050,00 terealisasi sebesar Rp. 11.194.880.715,00 sehingga terdapat kurang dari target sebesar Rp. 667.096.335,00 atau sebesar 94,38 %.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 9.305.231.202,63 telah terealisasi sebesar Rp. 74.092.902.040,48 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal sebesar Rp. 7.420.739.835,37, dengan rincian sebagai berikut :
  - PD Bank Pasar terealisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,00
  - Bank Jatim terealisasi sebesar Rp. 1.519.704.153,37
  - PDAM terealisasi sebesar Rp. 3.401.035.682,00
- b. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo Rp. 41.583.200,00
- c. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 66.630.579.005,11 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2006.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dalam rangka untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Agar lebih transparan dan akuntabel, maka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 telah disusun beberapa dokumen, yakni :

1. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
2. Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
3. Laporan Neraca
4. Laporan Aliran Kas

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2006 secara garis besar telah terealisasi dengan uraian sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 661.759.337.197,70, (ii) Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 623.534.414.104,90 sehingga terjadi (iii) surplus anggaran sebesar Rp. 38.224.923.092,80

Untuk pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 35.867.978.947,68 dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 74.092.902.040,48